

# Mengungkap Enigma Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Provinsi Indonesia

## Latar Belakang

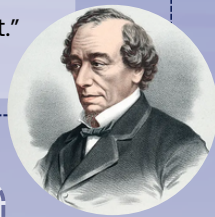
Tertuang dalam **Pembukaan UUD 1945 alinea IV**, kesejahteraan sebagai salah satu tujuan negara.

Faktanya, **5** dari 17 tujuan sebagai **pilar sosial**.

Komitmen **global** dan **nasional** mensejahterakan masyarakat.



"Kekuasaan hanya memiliki satu tugas - untuk menjamin kesejahteraan sosial rakyat."  
**Benjamin Disraeli**



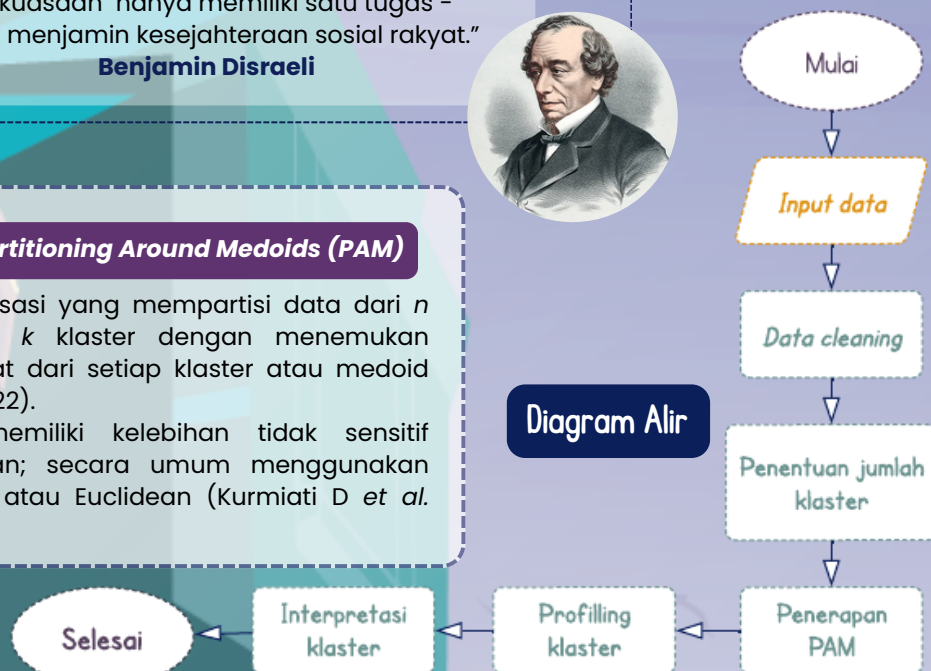
## Metodologi

### K-Medoids / Partitioning Around Medoids (PAM)

Algoritma klusterisasi yang mempartisi data dari  $n$  objek ke dalam  $k$  kluster dengan menemukan representasi pusat dari setiap kluster atau medoid (Sureja N et al. 2022).

Algoritma ini memiliki kelebihan tidak sensitif terhadap penciran; secara umum menggunakan jarak Manhattan atau Euclidean (Kurmiati D et al. 2021).

### Diagram Alir



## Tujuan

1

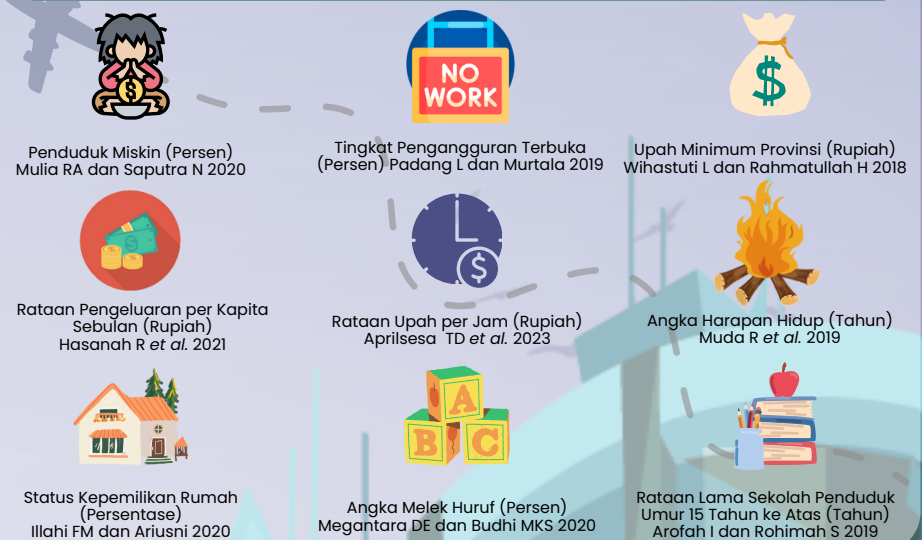
**Mengetahui** kategori tingkat kesejahteraan masing-masing provinsi.

2

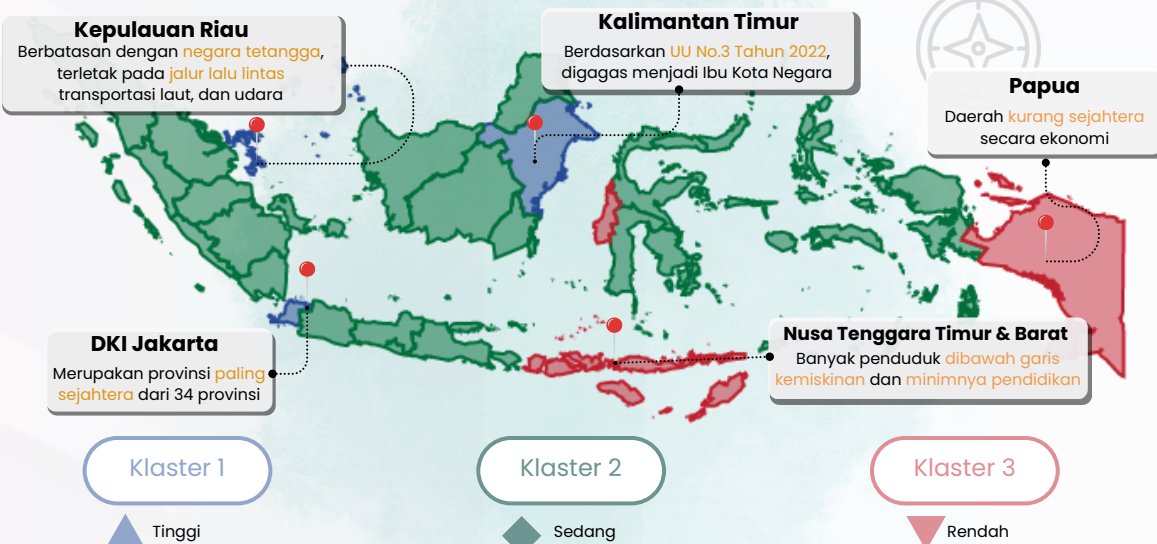
**Memberikan masukan** terkait provinsi yang memerlukan perhatian karena memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi yang rendah.

## Data

Data yang digunakan adalah data **kesejahteraan ekonomi** setiap provinsi di Indonesia tahun 2022 yang terdiri atas 9 peubah (sumber: BPS).



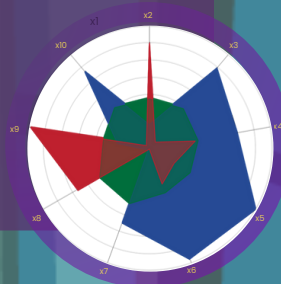
## Klusterisasi Provinsi Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan



**Kluster 1** memiliki tingkat kesejahteraan tertinggi dibandingkan kluster lainnya. Diindikasikan dengan rendahnya persentase penduduk miskin, dengan upah dan pengeluaran kebutuhan hidup yang tinggi. Dengan tuntutan pekerjaan pada jenjang pendidikan tingkat lanjut karena sulitnya memperoleh pekerjaan. Selain itu, populasi di kluster ini cenderung lebih padat, sehingga jarang penduduk memiliki rumah atas kepemilikan sendiri.

**Kluster 2** memiliki tingkat kesejahteraan sedang. Dengan penduduk miskin tidak terlalu banyak dan keperluan untuk pola hidup standar. Mayoritas jenjang ilmu tidak wajib setinggi pada kluster 1, dengan lebih banyak ketersediaan lapangan pekerjaan. Pada kluster ini mayoritas penduduk dapat memperoleh kepemilikan atas rumah lebih mudah, dengan harga relatif lebih terjangkau.

**Kluster 3** mayoritas terpinggirkan secara ekonomi, berada pada tingkat kesejahteraan terendah. Kemiskinan merajalela, dengan upah yang tidak terlalu tinggi. Banyak yang masih buta akan huruf, serta memiliki tingkat putus sekolah tertinggi.



## Sinergitas Pusat dan Daerah

Diperlukan adanya kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya sampai tingkat kabupaten/kota. Salah satu contoh programnya adalah melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Tanpa adanya kerjasama tidak akan tercipta pembangunan berkelanjutan dan masalah akan tingkat kesejahteraan yang tidak merata akan sulit teratasi (Prihartono et al. 2023).



## Skema Pengawasan Masalah

### Akses akan pendidikan

- Menambah jumlah sekolah dan fasilitas yang memadai
- Memberikan beasiswa atau bantuan pendidikan kepada siswa yang kurang mampu secara finansial

### Memperkuat infrastruktur

- Membangun dan memperbaiki jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya agar mudah diakses oleh masyarakat
- Memperbaiki sistem sanitasi dan pembuangan limbah
- Menyediakan akses listrik yang memadai
- Alokasikan sumber dana finansial yang memadai untuk proyek infrastruktur yang diprioritaskan

### Mendorong pembangunan ekonomi

- Memanfaatkan SDA melimpah yang Indonesia miliki dengan baik dan benar
- Memfasilitasi pelatihan dan pendampingan untuk membantu wirausaha lokal mengembangkan usaha mereka
- Menciptakan regulasi dan kebijakan pajak yang mendukung investasi

### Meningkatkan kualitas layanan kesehatan

- Membangun pusat kesehatan masyarakat yang dilengkapi dengan peralatan medis yang memadai
- Meningkatkan jumlah tenaga medis yang tersedia dan memberi mereka pelatihan yang terus-menerus
- Penyuluhan gaya hidup sehat dan mencegah penyakit

## Kesimpulan

Dengan menggunakan metode *K-Medoids*, dapat dikelompokkan 34 provinsi Indonesia ke dalam 3 kluster berdasarkan kesejahteraan. Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Barat terkategori ke dalam kluster yang memiliki tingkat kesejahteraan terendah. Sehingga perlu perhatian lebih terutama provinsi kluster tersebut dari pemerintah pusat ataupun daerah. Hal ini dapat terindikasi dari beberapa peubah indikator yang cenderung rendah dibandingkan kluster lainnya. Dengan harapan adanya sinergitas lanjut antara pemerintah pusat dan daerah mewujudkan skema pengawasan masalah sehingga dapat tercipta masyarakat yang sejahtera dan memenuhi *Sustainable Development Goals* SDG's Indonesia.

